



Kemenag Berikan Kuota Haji ke KPK

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini memberikan kursi atau kuota haji untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu mendapatkan kuota karena ikut dalam tim pengawas dan pengendali (wasdal). Untuk haji tahun ini, Kemenag masih menyiapkan kuota untuk KPK. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Mochammad Jasin menjelaskan, kuota haji untuk pegawai KPK tersebut tidak termasuk alias di luar kuota masyarakat umum. Jatah untuk pegawai KPK termasuk dalam kuota petugas haji. Dia menerangkan, kuota untuk tim wasdal itu juga diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kementerian terkait lainnya.

Jasin memaparkan, pemerintah Indonesia mendapatkan kuota petugas haji 3.125 kursi. Dari jumlah itu, 5 persen atau sekitar 156 kursi dipakai untuk tim wasdal. "Khusus untuk pegawai KPK, mendapatkan jatah empat sampai lima kuota haji," kata dia.

Menurut mantan pimpinan KPK tersebut, Kemenag hanya menyediakan kuota haji. Untuk urusan akomodasi selama di Arab Saudi dan tiket pesawat, anggaran instansi masing-masing yang digunakan. Dia menegaskan, Kemenag tidak membayari ongkos haji petugas KPK, BPKP, BPK, dan instansi wasdal lainnya.

Jasin mengatakan, tahun

lalu KPK tidak memberangkatkan pegawai untuk menggunakan jatah kuota haji dari Kemenag. "KPK tidak punya anggaran untuk membayar akomodasi pegawainya selama di Saudi," ungkap dia.

Meski KPK menggunakan kuota haji dari Kemenag, terang Jasin, pengawasan tetap diharapkan objektif. Dengan demikian, pelaksanaan haji diawasi secara berlapis. Selain diawasi pengawas internal Kemenag, pelaksanaan haji dipantau instansi luar lainnya. "Hasil pengawasan dari instansi lain itu berupa rekomendasi," ucap dia. Kemudian, di internal Kemenag, rekomendasi tersebut akan dipakai untuk perbaikan pelayanan haji tahun berikutnya. (wan/c9/end)